BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

a. Manajemen Pembangunan

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik atau hukum.

Ciri-ciri perencanaan pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri
4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah

6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan kemampuan sendiri atau nasional
8. Usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi

Perencanaan pembangunan menurut cakupan wilayah perencanaan pembangunan secara umum.

Berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun dari teori perencanaan pembangunan nasional dan teori perencanaa pembangunan berdasarkan cakupan wilayahnya secara umum dapat didefinisikan sebagai :

a. Perencanaan pembangunan nasional yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua faktor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara di seluruh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional.
b. Perencanaan pembangunan daerah yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja.
c. Perencanaan pembangunan regional yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah untuk kepentingan seluruh warga

negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

d. Perencanaan pembangunan kawasan yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

Pembangunan ketenakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Oleh karena itu, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Wrihatnolo (2006;9) Perusahan publik dalam pembangunan mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Perusahaan publik adalah suatu kelembagaan program pembangunan dan pemerintahan yang menyelenggarakan program, proyek, kegiatan pembangunan dan pemerintahan
2. Perusahaan publik adalah suatu badan hukum milik negara (perusahaan negara) yang menyelenggarakan suatu tindakan publik untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk warga negara.

b. Kebijakan dan Manajemen Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016;1497), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Menurut Follet, (2014:15) yang ditulis Kadar, Manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

Menurut Koontz dan O'Donnel, (2014:15) yang ditulis Kadar, Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Menurut Apley dan Lee, (2014:16) yang ditulis Kadar, Manajemen adalah strategis memanfaatkan tenaga dan fikiran orang lain untuk melaksanakan aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki kegiatan-kegiatan yang berupa : penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003;10), Manajemen tenaga kerja adalah salah satu bidang manajemen seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen perkantoran. Manajemen tenaga kerja mengkhususkan diri tentang hal ihwal yang berhubungan dengan faktor produksi manusia dengan segala aktivitasnya baik dalam usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun instansi, sehingga tenaga kerja tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, terutama di Kabupaten Luwu Utara, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin bertumbuh dan baik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah.

Menurut Todaro (2003:132) “penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersediannya lapangan kerja untuk para pencari kerja”.

Menurut Sumarsono (2003:70) secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut :

> “menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang/jasa. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya”.

Menurut Barthos (1999;17) tenaga kerja dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Tenaga kerja fisik

Tenaga kerja fisik berdasarkan kekuatan jasmaniah atau kekuatan otot yang berupa kekuatan tangan dan juga kaki.

b. Tenaga kerja berdasarkan pikiran

Tenaga kerja ini berdasarkan atau mengandalkan otak, akal dan pikirannya.

Pada umumnya dalam era saat ini untuk penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor yang berbeda maka diperlukan adanya pendidikan, keahlian khusus serta pengalaman kerja.

2. Permintaan Tenaga Kerja

Sudarsono (1988: 35), permintaan tenaga kerja :

> "Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan/instansi yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain. Permintaan tenaga kerja mempengaruhi tingkat upah dan faktor-faktor lainnya. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal produk (Value Marginal Product, VMP), yang merupakan hasil perkalian antara Produk Fisik Marginal dengan harga produk yang bersangkutan".

3. Angka Kerja

Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai angkatan kerja, yakni sebagai berikut:

Deskripsi dari BPS "angkatan kerja ialah penduduk dengan umur kerja yang ingin bekerja maupun lagi sedang mencari pekerjaan".

Deskripsi dari Sumarsono (2003:7) "angkatan kerja ialah bagian penduduk yang sanggup dan bersiap untuk menjalankan suatu pekerjaan".

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2, angkatan kerja adalah:

> “Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan. Dengan kata lain Angkatan kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja disebut juga dengan kelompok usia produktif”.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, angkatan kerja adalah:

> “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki”.

Prof. Soemitro Djojohadikusumo (1993) “angkatan kerja (labor force) sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif”.

Soeroto (1983) angkatan kerja adalah:

> “Sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai dan yang tidak mempunyai pekerjaan yang telah mampu dalam arti sehat fisik dan mental secara yuridis tidak kehilangan kebebasannya untuk memilih dan melakukan pekerjaan tanpa ada unsur paksaan”.

Payman Simanjuntak “angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan”.

Macam-Macam Angkatan Kerja

Berikut ini terdapat 2 macam-macam angkatan kerja, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kerjanya

   Berdasarkan kerjanya, terdapat 2 macam bagian, antara lain:

   a. Bekerja Maksimum

   Bekerja Penuh ialah angkatan kerja yang menggunakan jam kerja secara maksimum dalam kerjanya yang kurang lebih 8 sampai 10 jam per hari.

   b. Setengah Menganggur

   Setengah Menganggur ialah pekerja yang menggunakan waktu kerja yang kurang yang dapat dilihat dari bentuk jam kerja, kapasitas kerja dan juga perolehannya.

2. Berdasarkan Pengangguran

   Berdasarkan pengangguran, terdapat enam macam bagian, antara lain:

   a. Pengangguran Friksional

   Pengangguran Friksional ialah pengangguran yang berlangsung karena kesusahan sementara dalam mengumpulkan pencari kerja dan *lowongan kerja yang sudah ada.*

b. Pengangguran Musiman

Pengangguran Musiman ialah kondisi menganggur yang berlangsung karena perubahan musim. misalnya petani.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran Siklikal ialah pengangguran yang berlangsung efek dari naik turunnya aliran dalam ekonomi yang menimbulkan berlangsungnya permohonan tenaga kerja yang lebih minim dibandingkan dari permohonan tenaga kerja.

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural ialah pengangguran yang ditimbulkan terdapat pergantian dalam susunan atau struktur perekonomian.

e. Pengangguran Teknologi

Pengangguran Teknologi ialah pengangguran yang dipakai dalam prosedur pembuatan selalu berganti. Laju pergantian tersebut semakin hari semakin cepat.

f. Pengangguran Karena Kurangnya Permintaan Agregat

Pengangguran tersebut berlangsungnya karena terdapatnya permohonan total masyarakat yang didasarkan pada aktivitas penanaman modal.

4. Bukan Angkatan Kerja

Menurut BPS “Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 5 tahun keatas yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya”.

Masih menurut BPS “Rumah tangga adalah sekelompok otang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makananannya dari satu dapur”.

Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan, yaitu :

a. Golongan yang masih bersekolah
b. Golongan yang mengurusi rumah tangga
c. Golongan lain-lain :
    1. Penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiunan, bunga atau simpanan sewa milik
    2. Mereka yang hidupnay tergantung dari orang lain, misalnya karena kanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

c. Faktor-faktor dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja

a. Upah

Dalam suatu negara yang memiliki pemerintahan melindungi para buruh dengan mengatur dan menentukan upah minimum.

Menurut Wirawan (2015;394) Upah minimum adalah :

> “Upah paling rendah untuk setiap jam, setiap hari atau setiap bulan yang dapat diterima oleh setiap tenaga kerja atau buruh. Upah minimum tidak termasuk bonus atau benefit lainnya, baik uang atau bentuk lainnya yang dibayarkan secara langsung atau tidak langsung kepada pekerja yang dilakukannya”.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2000, Bab I, Pasal I, ayat 30 upah adalah :

> “Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

b. Jam Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 77 ayat 1 menjelaskan bahwa :

> "Jam kerja karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu dikenakan 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Sementara jan kerja karyawan yang bekerja 5 hari dalam seminggu dikenakan 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Jam kerja ini dapat dilakukan siamg atau malam hari dan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan".

Jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut tidak berlaku untuk sektor usaha tertentu, seperti pada pekerjaan sopir angkutan dalam jarak yang jauh, pengeboran minyak di lepas pantai, penerbangan dengan jarak jauh, pekerja di laut atau kapal, dan sebagainya. Ini karena jam kerja untuk sektor usaha tersebut mesti memperhatikan.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan unsur dasar dari pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk. Indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal, sedangkan angka melek huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dana menulis. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Untuk meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga

kerja Indonesia, telah dilakukan berbagai program dan pelatihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan seefektif dan semaksimal mungkin (Manunggal, 1995:27).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai acuan dan disamping itu untuk menghindari tanggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam studi pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian Andi Nurahman Ramdani, Supadi, Nunik Kadarwati (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 23 No. 2:2021), berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah 2014-2019”. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi, UMK dan IPM secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2014-2019, (2) Menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi, UMK dan IPM secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2014-2019.

   Hasil Penelitian tersebut : (1) Hasil PDRB tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019, (2) Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019, (3) Variabel UMK berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019, (4) Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

2. Penelitian Nur Insana (2019), berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Takalar”. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar, (2) untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar, (3) untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.

   Hasil atas penelitian tersebut : (1) Diketahui bahwa variable upah minimum regional (UMR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar, 92) Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar, (3) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Adapun definisi variabel tersebut adalah :

1. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah angkatan kerja yang diterima atau ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.
2. Upah adalah upah yang diberlakukan kepada tenaga kerja atau buruh sesuai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara.
3. Tingkat pendidikan adalah mengukur kemampuan pengetahuan tenaga kerja di Kabupaten Luwu Utara.
4. Jam Kerja adalah waktu yang diberlakukan untuk pekerja atau buruh.

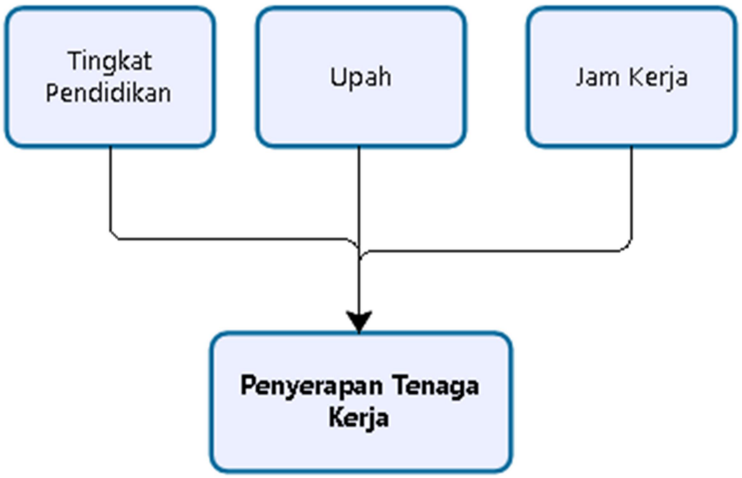
D. Kerangka Pikir

Upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Antara upah dan jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat hubungan yang berbanding terbalik.

Hal ini tertuang dalam teori Sumarsono (2003:106) yang mengemukakan bahwa upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang selanjutnya akan mengakibatkan pengurangan atau penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Menurut Kincoro (2002), Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan tenaga kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.

Kerangka Pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka didalamnya berisikan intisari dari seluruh dasar-dasar teori yang ada didalam skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan'. Adapun skema tersebut sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

: